

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI DAN OBJEK KEGIATAN

2.1 Deskripsi Organisasi



Gambar 2.1 Logo GMLS[13]

Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pengurangan risiko bencana melalui berbagai kegiatan mitigasi, edukasi, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Organisasi ini berfokus pada upaya menghadapi potensi bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami, yang mengancam kawasan pesisir Lebak Selatan, Provinsi Banten. GMLS secara resmi didirikan pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Pembentukan GMLS tidak terlepas dari kepedulian Anis Faisal Reza, yang lebih dikenal dengan nama Abah Lala. Sejak bertugas sebagai aparatur sipil negara di wilayah pesisir Lebak Selatan pada tahun 2014, berbagai kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Kepedulian tersebut semakin meningkat karena kedua putranya menempuh pendidikan di sekolah yang berada di sekitar kawasan pesisir. Berdasarkan kondisi tersebut, berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana mulai diinisiasi

melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang bertujuan membangun budaya kesiapsiagaan di lingkungan masyarakat.

Berbekal pengalaman dan kepedulian tersebut, Abah Lala bersama masyarakat setempat mulai membangun gerakan mitigasi yang melibatkan berbagai pihak. Upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi mengenai risiko bencana, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, simulasi evakuasi, serta penguatan sistem kesiapsiagaan di tingkat komunitas. Seiring berjalannya waktu, inisiatif tersebut berkembang dan kemudian menjadi Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS), yang hingga saat ini aktif mendukung berbagai program mitigasi bencana dan pengurangan risiko tsunami di wilayah Lebak Selatan.

Didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap keselamatan keluarga dan masyarakat sekitar, Abah Lala bersama beberapa rekan mulai membangun jaringan radio komunikasi pada tahun 2018. Jaringan ini dimanfaatkan sebagai media penyebaran informasi sekaligus sarana peringatan dini apabila terjadi bencana. Inisiatif tersebut mendapat respons positif dari masyarakat dan secara bertahap berkembang menjadi gerakan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.

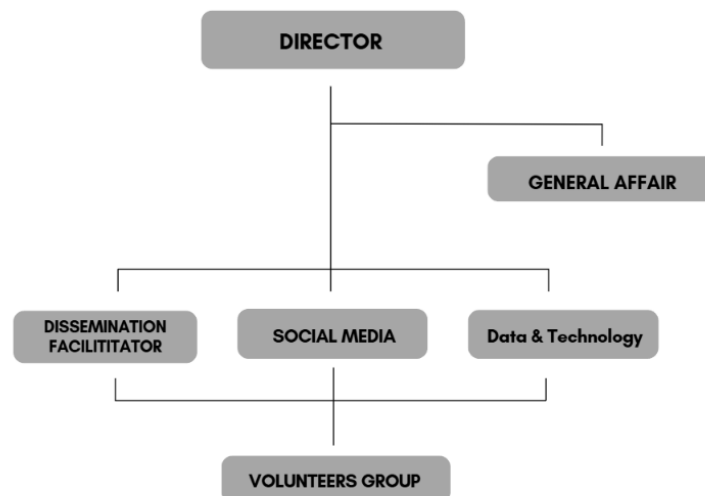
Perkembangan gerakan tersebut kemudian melahirkan sebuah organisasi yang lebih terstruktur dan resmi dibentuk sebagai Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) pada tahun 2020. Hingga kini, GMLS terus menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana, antara lain melalui edukasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, kegiatan mitigasi berbasis komunitas, serta pengembangan sistem peringatan dini guna mendukung respons yang cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat.

2.2 Struktur Organisasi

Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program mitigasi bencana secara efektif

dan terkoordinasi. Hingga tahun 2026, organisasi ini terdiri dari lima anggota yang berasal dari berbagai latar belakang keahlian dan rentang usia yang berbeda. Meskipun jumlah anggotanya relatif sedikit, GMLS tetap berupaya menjalankan berbagai program dan kegiatan mitigasi bencana secara optimal demi meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah Lebak Selatan.

Dalam menjalankan operasional organisasi, GMLS menerapkan pembagian tugas yang jelas melalui beberapa posisi utama yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Struktur organisasi tersebut dibentuk untuk memastikan setiap program dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terarah sehingga tujuan organisasi dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana dapat tercapai dengan baik. Adapun susunan struktur organisasi GMLS beserta uraian tugas masing-masing posisi adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi GMLS

Sumber : Website GMLS

A. *Director*

Jabatan *Director* di Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) diemban oleh Anis Faisal Reza sebagai pendiri organisasi. Dalam struktur kepengurusan, posisi tersebut memiliki tanggung jawab dalam mengarahkan kebijakan organisasi, menyusun rencana strategis, serta memastikan setiap program dapat terlaksana sesuai dengan visi dan misi GMLS. Seluruh kebijakan yang ditetapkan diarahkan

untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami di kawasan pesisir Lebak Selatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, berbagai perencanaan strategis disusun untuk mendukung pencapaian indikator *Tsunami Ready* sekaligus memperkuat implementasi *Community Resilience Program* yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat. Upaya tersebut juga didukung melalui pembangunan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menggunakan pendekatan pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan media. Kerja sama dengan sejumlah lembaga nasional maupun internasional, seperti IOC-UNESCO, BMKG, BNPB, dan U-Inspire Indonesia, turut dikembangkan sebagai bagian dari penguatan kapasitas organisasi serta keberlanjutan program mitigasi bencana.

Pada tahap pelaksanaan program, fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan juga berada di bawah tanggung jawab *Director*. Pengawasan tersebut mencakup kesesuaian pelaksanaan program dengan standar dan indikator *Tsunami Ready*, mulai dari kegiatan pemetaan kawasan berisiko, pengembangan sistem peringatan dini, penyelenggaraan edukasi kebencanaan, hingga pelaksanaan pelatihan dan simulasi evakuasi secara berkala. Selain itu, pada kondisi tanggap darurat, koordinasi penanganan bencana juga dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia, distribusi logistik, serta pelaksanaan respons darurat dapat berlangsung secara terkoordinasi, tepat sasaran, dan efektif.

B. General Affair

Posisi *General Affair* dijabat oleh Resti Yuliani yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional organisasi. Tanggung jawab utama posisi ini mencakup pengelolaan administrasi, dokumentasi, serta kebutuhan logistik yang diperlukan dalam berbagai kegiatan GMLS. *General Affair* bertugas melakukan pendataan dan inventarisasi berbagai sumber daya, termasuk peralatan komunikasi, perlengkapan evakuasi, serta kebutuhan logistik lainnya yang digunakan dalam situasi darurat maupun kegiatan rutin organisasi.

Selain itu, *General Affair* juga berperan dalam mengatur jadwal kegiatan tahunan, mengoordinasikan distribusi materi edukasi kepada masyarakat, serta memastikan ketersediaan media informasi publik seperti peta jalur evakuasi dan papan informasi kebencanaan di lokasi-lokasi strategis. Dokumentasi kegiatan pelatihan, simulasi, dan sosialisasi juga menjadi bagian penting dari tugasnya sebagai bahan pelaporan kepada mitra dan lembaga pendukung.

C. Dissemination Facilitator

Posisi *Dissemination Facilitator* dijalankan oleh Layla Rashida Anis dengan tanggung jawab utama pada penyebaran informasi kebencanaan serta penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang mitigasi bencana. Ruang lingkup tugas pada posisi ini mencakup penyusunan dan pengembangan materi edukasi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, sehingga informasi mengenai mitigasi dapat dipahami dengan lebih mudah. Penyampaian materi dilakukan dengan memadukan pendekatan ilmiah dan nilai-nilai kearifan lokal agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat di wilayah pesisir.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program, berbagai kegiatan edukatif secara berkala turut diselenggarakan, seperti pelatihan, lokakarya, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan. Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Selain berfokus pada edukasi masyarakat, pembinaan terhadap relawan juga menjadi bagian dari tanggung jawab posisi ini. Materi yang diberikan meliputi prosedur evakuasi, pemberian pertolongan pertama, serta pemanfaatan perangkat peringatan dini. Jangkauan penyebaran informasi juga diperluas melalui berbagai media dan pendekatan berbasis budaya lokal, antara lain *podcast*, *door to door program*, Safari Kampung, dan Program Marimba, sehingga pesan mitigasi dapat diterima oleh masyarakat secara lebih efektif.

D. Social Media

Posisi *Social Media* dijabat oleh Adeline Syarifah Anis yang bertugas mengelola komunikasi digital dan publikasi organisasi. Melalui berbagai platform media sosial, posisi ini berupaya menyebarluaskan informasi mengenai mitigasi bencana, indikator *Tsunami Ready*, serta pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam.

Selain membuat konten edukatif berupa infografis, video, dan materi kampanye digital lainnya, *Social Media* juga bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi cuaca, peringatan dini, dan perkembangan situasi darurat kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia. Di sisi lain, posisi ini berperan dalam membangun hubungan dengan media, menjawab pertanyaan masyarakat, menjalin kerja sama dengan influencer lokal, serta memantau isu-isu kebencanaan yang berkembang di media sosial sebagai bahan evaluasi dan pengembangan strategi komunikasi organisasi.

E. Data & Technology

Posisi *Data & Technology* di GMLS dijalankan oleh Dayah Fata Fadillah dengan tanggung jawab dalam pengelolaan data kebencanaan serta pengembangan teknologi yang mendukung kegiatan mitigasi bencana. Lingkup pekerjaan pada posisi ini mencakup penyusunan, pemeliharaan, dan pembaruan data spasial untuk mengidentifikasi kawasan yang berpotensi terdampak tsunami, banjir, maupun longsor di wilayah Lebak Selatan melalui pemanfaatan teknologi *Geographic Information System (GIS)*. Selain itu, pengelolaan basis data yang memuat informasi mengenai jumlah penduduk di kawasan rawan bencana beserta data sumber daya ekonomi yang berpotensi terdampak juga menjadi bagian dari tanggung jawab yang dijalankan.

Pada aspek sistem peringatan dini, berbagai perangkat penerima dan penyebar informasi kebencanaan dikelola agar tetap beroperasi secara berkelanjutan selama

24 jam. Pemeriksaan dan pengujian terhadap perangkat tersebut juga dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh sistem dapat berfungsi dengan baik ketika terjadi kondisi darurat. Di samping itu, pemanfaatan teknologi drone turut diterapkan sebagai sarana pemantauan kawasan berisiko maupun untuk mendukung proses asesmen pascabencana. Penerapan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi pemantauan sekaligus memperkuat efektivitas kegiatan mitigasi dan penanganan bencana.

F. Volunteers

Keberhasilan berbagai program GMLS juga didukung oleh kelompok relawan yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Para relawan berkontribusi dalam berbagai aspek, mulai dari membantu kegiatan administrasi dan operasional hingga mendukung pelaksanaan program di lapangan.

Dalam kegiatan mitigasi, relawan berperan dalam mendistribusikan materi edukasi, memasang papan informasi kebencanaan, serta membantu pelaksanaan simulasi dan pelatihan tanggap darurat. Saat terjadi bencana, mereka juga berfungsi sebagai garda terdepan dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Selain itu, relawan secara aktif memantau kondisi sarana mitigasi seperti jalur evakuasi dan posko, serta menjalin komunikasi dengan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas untuk memastikan seluruh program yang dijalankan bersifat inklusif.

Dengan struktur organisasi yang sederhana namun efektif, GMLS mampu bergerak secara cepat dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan. Meskipun didukung oleh jumlah anggota yang relatif terbatas, organisasi ini telah berhasil menjalankan berbagai program yang memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat di wilayah Lebak Selatan.

2.3 Visi dan Misi Organisasi

Visi dan misi Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) menjadi pedoman dalam penyelenggaraan setiap program, penyusunan kebijakan, serta pengambilan keputusan organisasi. Melalui visi yang dimiliki, GMLS berkomitmen untuk membangun masyarakat Lebak Selatan yang memiliki kesiapsiagaan tinggi, mampu beradaptasi terhadap ancaman bencana, serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai kondisi darurat secara mandiri. Sebagai wujud pencapaian visi tersebut, sejumlah misi telah dirumuskan sebagai dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan mitigasi bencana.

Misi yang diusung GMLS diarahkan pada penguatan upaya pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pembangunan ketahanan komunitas dalam menghadapi potensi bencana. Selain menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja, misi tersebut juga berperan sebagai landasan bagi seluruh pengurus dan relawan dalam menjalankan tanggung jawabnya secara terarah, berkesinambungan, dan selaras dengan tujuan organisasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana.

2.3.1 Visi Organisasi

Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) memiliki visi yang berfokus pada pembangunan masyarakat yang tangguh terhadap ancaman bencana alam. Visi tersebut adalah:

“Masyarakat Lebak Selatan yang Siaga dan Tangguh Menghadapi Potensi Bencana Alam.”

Visi ini mencerminkan harapan dan komitmen GMLS untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran, pengetahuan, serta kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Melalui peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan, diharapkan risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat diminimalkan sehingga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih terjaga.

2.3.2 Misi Organisasi

Untuk mewujudkan visi tersebut, GMLS menetapkan beberapa misi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan organisasi.

1. Membangun Database Kebencanaan

Misi pertama GMLS berfokus pada pengembangan database kebencanaan yang komprehensif, akurat, dan terintegrasi. Ketersediaan data yang terkelola dengan baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana karena menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta penyusunan strategi mitigasi. Melalui pengelolaan data yang sistematis, organisasi dapat mengidentifikasi tingkat kerawanan suatu wilayah dan menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Database kebencanaan yang dikembangkan mencakup berbagai informasi penting, seperti potensi ancaman bencana, lokasi wilayah rawan, jumlah penduduk yang berpotensi terdampak, jalur dan titik evakuasi, serta ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan dalam situasi darurat. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program kesiapsiagaan dan respons bencana yang lebih terukur.

Dengan adanya database yang lengkap dan terintegrasi, proses mitigasi bencana dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terarah. Data yang tersedia tidak hanya mendukung kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, tetapi juga membantu mempercepat proses evakuasi, koordinasi bantuan, serta pengambilan keputusan saat terjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, pengembangan database kebencanaan menjadi salah satu langkah strategis dalam

meningkatkan kapasitas organisasi dan memperkuat ketangguhan masyarakat terhadap risiko bencana.

2. Menjalin Kemitraan dengan Pemerintah, Dunia Usaha, dan Organisasi Kemanusiaan

GMLS menyadari bahwa upaya pengurangan risiko bencana memerlukan keterlibatan banyak pihak. Oleh karena itu, organisasi berkomitmen membangun kerja sama yang kuat dengan pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, media, dan organisasi kemanusiaan. Melalui kemitraan tersebut, GMLS dapat memperluas jangkauan program, meningkatkan kapasitas organisasi, serta memperoleh dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

3. Mengembangkan Edukasi Mitigasi Kebencanaan

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kebencanaan menjadi salah satu fokus utama GMLS. Melalui berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan kampanye publik, organisasi berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana yang ada di lingkungan mereka. Edukasi yang berkelanjutan diharapkan mampu membentuk perilaku yang lebih siap dan responsif sehingga masyarakat mengetahui langkah-langkah yang tepat sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

4. Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Potensi Bencana

Selain melaksanakan kegiatan edukasi kebencanaan, GMLS juga berupaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui berbagai program yang bersifat praktis dan partisipatif. Program tersebut meliputi pelatihan tanggap darurat, simulasi evakuasi tsunami, pembentukan kelompok siaga bencana di tingkat komunitas, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung

proses mitigasi dan penanganan keadaan darurat. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami prosedur keselamatan serta mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi bencana.

Melalui pelaksanaan program tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai risiko bencana, tetapi juga memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan yang diperlukan dalam situasi darurat. Pengalaman praktis yang diperoleh dari pelatihan dan simulasi diharapkan dapat meningkatkan kesiapan individu maupun komunitas dalam menghadapi ancaman bencana secara terorganisasi. Dengan demikian, proses evakuasi dan penanganan darurat dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi sehingga risiko korban jiwa serta dampak kerugian akibat bencana dapat diminimalkan.

5. Membangun Jaringan Komunitas yang Responsif terhadap Bencana

Misi terakhir GMLS berfokus pada pembentukan jaringan komunitas yang aktif, terorganisasi, dan memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi kebencanaan. Jaringan ini melibatkan relawan, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, serta berbagai elemen komunitas yang telah memperoleh pelatihan dan pembekalan terkait mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat di tingkat lokal.

Keberadaan jaringan komunitas yang kuat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan kebencanaan, mulai dari penyebaran informasi peringatan dini, koordinasi evakuasi, hingga distribusi bantuan saat terjadi keadaan darurat. Melalui kerja sama yang terbangun antaranggota komunitas, proses

respons bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah, dan efektif sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

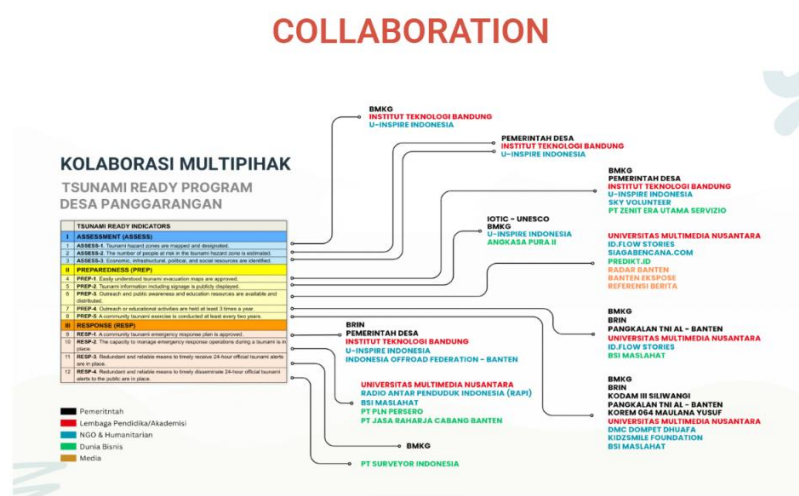
Selain mendukung kegiatan tanggap darurat, jaringan komunitas juga berperan dalam menumbuhkan budaya kesiapsiagaan di masyarakat. Dengan adanya keterlibatan aktif dari berbagai unsur komunitas, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penerima bantuan ketika bencana terjadi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ketangguhan masyarakat serta meningkatkan kemampuan komunitas dalam menghadapi risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan.

2.4 Kolaborasi Organisasi

Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) menyadari bahwa upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak. Kompleksitas permasalahan kebencanaan menuntut adanya kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar program yang dijalankan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Atas dasar tersebut, sejak awal pembentukannya GMLS secara aktif menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat.

Kolaborasi yang dibangun mencakup berbagai sektor, mulai dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, hingga komunitas masyarakat setempat. Melalui kerja sama tersebut, GMLS memperoleh dukungan dalam berbagai bentuk, seperti transfer pengetahuan, penyediaan sumber daya, pelaksanaan pelatihan, pendampingan program, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dukungan tersebut berperan penting dalam meningkatkan kualitas program mitigasi bencana yang dilaksanakan di wilayah Lebak Selatan.

Sinergi antara GMLS dan para mitra juga mendorong terciptanya program yang lebih terencana dan berkelanjutan. Keterlibatan berbagai pihak memungkinkan pelaksanaan kegiatan edukasi, pelatihan, simulasi, serta pengembangan sistem kesiapsiagaan masyarakat dilakukan secara lebih optimal. Dengan adanya kolaborasi yang kuat, upaya pengurangan risiko bencana di Lebak Selatan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana.



Gambar 2.3 Kolaborasi GMLS[13]

Sumber : Website GMLS

Gambar 2.3 memperlihatkan indikator yang ditetapkan oleh UNESCO *Intergovernmental Oceanographic Commission* (IOC) sebagai dasar penilaian bagi suatu wilayah untuk memperoleh status *Tsunami Ready*. Pengakuan tersebut diberikan kepada wilayah yang telah memenuhi standar kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana tsunami. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu *Assessment* (penilaian), *Preparedness* (kesiapsiagaan), dan *Response* (respons). Setiap aspek memiliki serangkaian indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu wilayah dalam mengidentifikasi risiko, mempersiapkan masyarakat, serta melaksanakan penanganan ketika bencana terjadi.

Dalam memenuhi indikator pada aspek *Assessment*, Gugus Mitigasi Lebak Selatan (GMLS) bekerja sama dengan berbagai institusi, di antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyediaan data kebencanaan, seperti penyusunan peta kawasan rawan tsunami, pendataan jumlah penduduk yang berada pada wilayah berisiko, serta inventarisasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan mitigasi dan penanganan bencana.

Data yang diperoleh dari hasil kolaborasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program mitigasi bencana di wilayah Lebak Selatan. Informasi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan kesiapsiagaan, penyusunan strategi pengurangan risiko bencana, serta pengambilan keputusan pada kondisi darurat. Selain itu, data kebencanaan juga dimanfaatkan sebagai bahan edukasi kepada masyarakat agar pemahaman mengenai potensi tsunami, tingkat risiko, serta prosedur evakuasi dapat semakin meningkat.

Tabel 2.1 Tabel Indikator *Assessment, Preparedness, Response*

Kategori	Indikator	Pihak yang Terlibat
I. <i>Assessment</i> (Penilaian)	<i>Assessment-1:</i> Pemetaan wilayah yang memiliki potensi terdampak tsunami telah disusun dan ditetapkan sebagai acuan mitigasi.	Pemerintah Desa, Institut Teknologi Bandung (ITB), BMKG, U-Inspire Indonesia, Pangkalan TNI AL Banten
	<i>Assessment-2:</i> Perkiraan jumlah penduduk yang berada di kawasan berpotensi terdampak tsunami telah dihitung sebagai dasar penyusunan rencana mitigasi.	Pemerintah Desa, BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB)
	<i>Assessment-3:</i> Pendataan terhadap sumber daya yang mencakup aspek ekonomi, infrastruktur, sosial, dan kelembagaan telah dilakukan untuk mendukung kesiapsiagaan bencana.	Pemerintah Desa, U-Inspire Indonesia, BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB)

II. Preparedness (Kesiapsiagaan)	Preparedness-1: Peta jalur evakuasi tsunami telah disahkan dan dipublikasikan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman evakuasi oleh masyarakat.	Pemerintah Desa, BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB), U-Inspire Indonesia
	Preparedness-2: Informasi mengenai potensi tsunami beserta tanda-tanda awal kejadiannya telah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.	BMKG, Pemerintah Desa, U-Inspire Indonesia
	Preparedness-3: Materi edukasi dan media pembelajaran mengenai kesiapsiagaan bencana telah disediakan serta disebarluaskan kepada masyarakat.	Universitas Multimedia Nusantara (UMN), BNPB, Ekspos, U-Inspire Indonesia
	Preparedness-4: Program edukasi dan sosialisasi mengenai mitigasi tsunami telah dilaksanakan secara rutin, dengan frekuensi sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu tahun.	Pemerintah Desa, U-Inspire Indonesia, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Multimedia Nusantara (UMN)
	Preparedness-5: Simulasi evakuasi tsunami bagi masyarakat telah dijadwalkan dan dilaksanakan secara berkala, paling sedikit satu kali dalam dua tahun.	Pemerintah Desa, Universitas Multimedia Nusantara (UMN), BMKG, U-Inspire Indonesia
III. Response (Respon)	Response-1: Dokumen rencana tanggap darurat tsunami pada tingkat komunitas telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan penanganan bencana.	Pemerintah Desa, BMKG, U-Inspire Indonesia, Institut Teknologi Bandung (ITB)
	Response-2: Kapasitas masyarakat dalam melaksanakan operasi tanggap darurat saat terjadi tsunami telah dipersiapkan melalui berbagai kegiatan kesiapsiagaan.	Pemerintah Desa, BMKG, Angkasa Pura II, Pangkalan TNI AL Banten
	Response-3: Mekanisme penerimaan informasi peringatan resmi tsunami telah tersedia dan mampu beroperasi selama 24 jam tanpa henti.	BMKG, Pemerintah Desa, U-Inspire Indonesia, Institut Teknologi Bandung (ITB)
	Response-4: Sistem peringatan dini tsunami resmi telah diterapkan dan	BMKG, Pemerintah Desa, Angkasa Pura II, Universitas

	dioperasikan secara berkelanjutan selama 24 jam.	Multimedia Nusantara (UMN)
--	--	----------------------------

Tabel 2.1 menjelaskan indikator pada tahap *Assessment* (Penilaian) yang merupakan langkah awal dalam upaya mitigasi bencana tsunami. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi wilayah, tingkat risiko, serta sumber daya yang tersedia sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan program kesiapsiagaan yang tepat. Indikator pertama berfokus pada pemetaan dan penetapan zona rawan tsunami sebagai acuan dalam menentukan wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Selanjutnya, dilakukan estimasi jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan tsunami untuk mengetahui besarnya potensi risiko terhadap masyarakat. Selain itu, tahap *assessment* juga mencakup identifikasi berbagai sumber daya yang tersedia, baik dari aspek ekonomi, infrastruktur, sosial, maupun kelembagaan yang dapat dimanfaatkan dalam proses penanggulangan bencana. Pelaksanaan tahap ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, BMKG, Institut Teknologi Bandung (ITB), serta organisasi pendukung lainnya yang memiliki kompetensi di bidang kebencanaan.

Indikator pada tahap *Preparedness* (Kesiapsiagaan) yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi tsunami. Tahap ini dilakukan melalui penyediaan informasi, edukasi, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko bencana serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Salah satu indikator penting pada tahap ini adalah tersedianya peta evakuasi tsunami yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, informasi terkait tsunami, termasuk tanda-tanda awal terjadinya bencana, harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang memadai. Upaya kesiapsiagaan juga didukung dengan penyediaan materi edukasi, pelaksanaan sosialisasi secara berkala, serta simulasi evakuasi yang dilakukan secara rutin. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, BMKG, ITB, Universitas Multimedia Nusantara, BNPB, dan organisasi pendukung lainnya untuk memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

Indikator pada tahap *Response* (Respon) yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat dan lembaga terkait dalam memberikan tanggapan cepat ketika tsunami terjadi. Tahap ini menitikberatkan pada kesiapan sistem dan koordinasi antarinstansi dalam menjalankan prosedur tanggap darurat. Indikator yang dinilai meliputi ketersediaan rencana tanggap darurat tsunami, kemampuan mengelola operasi darurat selama bencana berlangsung, serta keberadaan sistem peringatan dini yang dapat beroperasi secara andal selama 24 jam. Selain menerima informasi peringatan resmi dari lembaga berwenang, sistem juga harus mampu menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Keberhasilan tahap respon sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah desa, BMKG, institusi pendidikan, sektor swasta, dan berbagai organisasi pendukung lainnya. Dengan adanya sistem respon yang baik, dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan melalui tindakan yang cepat, terkoordinasi, dan efektif.

